ABSTRAK

Perkembangan teknologi selain memiliki dampak positif juga memiliki dampak negatif. Salah satu kejahatan yang ditimbulkan oleh perkembangan dan kemajuan teknologi informasi adalah kejahatan yang berkaitan dengan aplikasi internet. Kejahatan ini sering disebut dengan *cybercrime*. Kejahatan *cybercrime* mencakup semua jenis kejahatan beserta modus operandinya yang dilakukan dengan menggunakan fasilitas internet serta sebagai dampak negatif aplikasi internet. Karena sifat kejahatan cybercrime yang tidak mengenal batas territorial negara, terungkapnya tindak kejahatan cybercrime di Indonesia tidak lepas dari peran Sekretariat National Central Bureau (NCB)-Interpol Indonesia.

Permasalahan yang menjadi dasar penelitian ini adalah bagaimana peran National Central Bureau (NCB)-Interpol Indonesia dalam pemberantasan tindak kejahatan cybercrime, mengapa NCB-Interpol Indonesia terlibat aktif dalam pemberantasan tindak kejahatan cybercrime dan hambatan apa saja yang muncul dalam pemberantasan tindak kejahatan cybercrime yang dilakukan oleh NCB-Interpol Indonesia.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Data primer dan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara yang dilakukan dengan pihak Sekretariat NCB-Interpol Indonesia.

NCB-Interpol Indonesia berperan meneruskan informasi tentang adanya tindak kejahatan cybercrime yang dilakukan oleh warga negara asing ataupun warga negara Indonesia, yang didapat dari NCB negara lain ke instansi penegak hukum negara Indonesia. Alasan NCB-Interpol Indonesia turut terlibat aktif dalam melakukan pemberantasan tindak kejahatan cybercrime karena untuk melakukan kewajiban internasional. Kewajiban internasional tersebut dapat di aplikasikan melalui konvensi internasional dan undang-undang yang berlaku di Negara Indonesia sehingga tujuan dan fungsi dari ICPO-Interpol dapat tercapai. Hambatan yang muncul dalam menanggulangi tindak kejahatan cybercrime yaitu berkaitan dengan batas negara dan yurisdiksi, perbedaan hukum nasional sehingga sulit untuk menentukan hukum mana yang di berlakukan, perjanjian ektradisi, dan proses identifikasi pelaku kejahatan cybercrime.

Kata Kunci: ICPO-Interpol, NCB-Interpol Indonesia, dan Cybercrime

ABSTRACT

Technological development besides having positive impact also having negative impact.One of the crimes that appears by the development and advances in information technology is a crime related to the internet applications. Thesecrimesare often referredtocybercrime. Cybercrime covers all kind of crimes as well as modus operandi conducted using internet facility as result of negative impact of internet applications. Due to cybercrime did not recognize state territorial, the unfolding of cybercrime in Indonesia is inseparable of the participation of National Central Bureau (NCB)-Interpol Indonesia.

The problems thatbecame the basisof thisresearcharehow the role National Central Bureau(NCB)-Interpol Indonesia to combatscybercrime, whyNCB-Interpol Indonesiaactively involved in combating cybercrime and what the obstacles arise in combating cybercrime crimes committed by NCB-Interpol Indonesia.

The method use in this research is the method normative juridical approach. Research specification used in this research is descriptive - analytics. Primary data and secondary data obtained through literature study and interviews conducted by Secretariat NCB-Interpol Indonesia.

NCB-Interpol Indonesia having role to pass the information of cybercrime committed by foreign citizen or Indonesian citizen obtained from NCB other country to Indonesian law enforcement. The reason of NCB-Interpol Indonesia actively involving to combats cybercrime is because of International obligation. That International obligation applicable through International Convention and Acts in Indonesia so that theaimandfunctionsof theICPO-Interpol can beachieved.The obstacle that arise in unfolding cybercime are related with state borders an jurisdiction, differences in national laws so it is difficult to determaine which law takes effect, extradition agreements, and the process of identifying the suspect of cybercrime.

Keywords: ICPO-Interpol, NCB-Interpol Indonesia, and Cybercrime